

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan nasional secara berkelanjutan yang mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Proses ini tidak hanya menunjukkan adanya penambahan hasil produksi barang dan jasa di suatu wilayah, melainkan juga menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator kuantitatif utama yang digunakan secara esensial untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Secara konseptual, PDB merepresentasikan akumulasi nilai total dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah geografis tertentu dalam kurun waktu tertentu guna mengidentifikasi akselerasi pertumbuhan tersebut, analisis dilakukan dengan menghitung presentase fluktuasi nilai PDB di tingkat nasional. Sementara itu, untuk evaluasi yang lebih spesifik di level provinsi maupun kabupaten/kota, instrumen analisis dialihkan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Prabawa et al., 2024).

Dominasi pertumbuhan di atas rata-rata pada bidang ekonomi, industri, pengolahan, dan pertanian secara konsisten dimiliki oleh pulau jawa. Namun, situasi ini terganggu pada tahun 2020 akibat pandemi *covid-19* yang memaksa terjadinya reorientasi perilaku di kalangan masyarakat, produsen, dan konsumen, terutama di Pulau Jawa. Keterbatasan akses terhadap proses

produksi dan belanja memicu transformasi struktural yang signifikan. Hal tersebut berimplikasi pada depresi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa secara bertahap serta menimbulkan dampak kerugian yang (Asfar et al., 2022). Berikut data perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019 - 2025 :

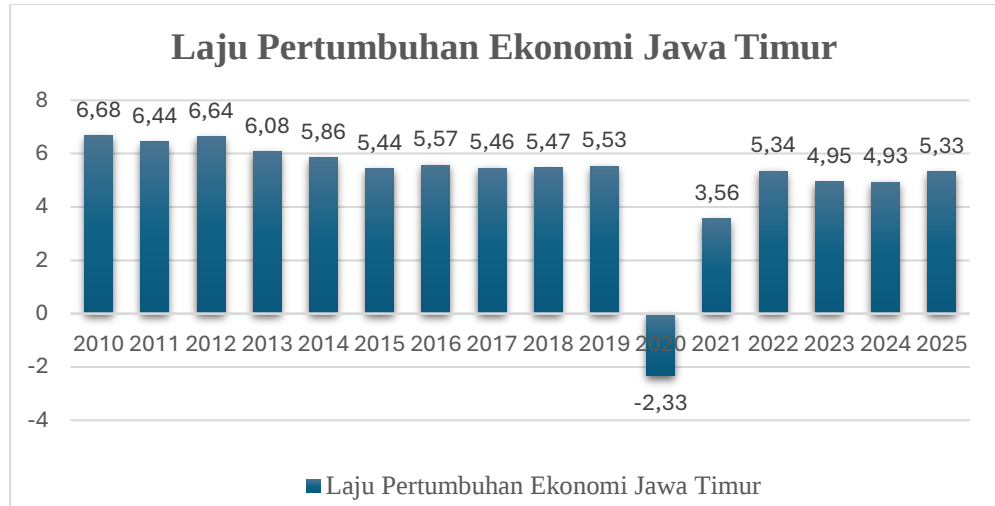
Tabel 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa

Tahun	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Nasional
2019	5,82	5,02	5,41	6,59	5,53	5,29	5,02
2020	-2,39	-2,52	-2,65	-2,69	-2,33	-3,38	-2,07
2021	3,56	3,74	3,33	5,16	3,56	4,62	3,7
2022	5,25	5,45	5,31	5,15	5,34	5,03	5,31
2023	4,96	5	4,98	5,07	4,95	4,81	5,05
2024	4,9	4,95	4,92	5,02	4,93	4,75	5,03
2025	5,21	5,32	5,37	5,49	5,33	5,37	5,11

Sumber Badan Pusat Statistik 2026

Berdasarkan tabel 1 Diketahui bahwa laju pertumbuhan masing-masing provinsi di pulau Jawa dalam lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Secara makro ekonomi, Jawa Timur memegang Peranan krusial sebagai kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, dengan laju pertumbuhan yang kompetitif dan sejajar terhadap rata-rata nasional maupun provinsi besar lainnya di Pulau Jawa. Struktur Produk Domestik Bruto (PDRB) wilayah Jawa Timur di dominasi oleh tiga pilar utama, yakni sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 29,03%, diikuti oleh perdagangan sebesar 18,18%, serta sektor pertanian yang menyumbang 12,80% (BPS

Provinsi Jawa Timur 2026). Berikut adalah grafik dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2025



Sumber Badan Pusat Statistik 2026

Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambar 2. Diketahui sepanjang periode 2010 hingga 2025, dinamika perekonomian di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren perkembangan yang tidak konstan dan cenderung mengalami pasang surut. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dicirikan oleh pergeseran angka persentase yang bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Perekonomian Jawa Timur sempat mengalami penurunan terendah selama empat belas tahun terakhir pada tahun 2020 sebesar -2,33%. Fenomena ini melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Jawa Timur, dikarenakan adanya masa pandemi *covid-19* pertumbuhan ekonomi menjadi menurun dan mengalami resesi.

Perkembangan ekonomi regional tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga kerja yang menjadi fondasi fundamental dalam struktur ekonomi lokal. Hal ini disebabkan karena ketersediaan serta penyerapan angkatan kerja

memiliki pengaruh krusial terhadap penentuan kapasitas produksi dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks pendorong pertumbuhan ekonomi, populasi memegang dua fungsi vital. Secara sisi permintaan, mereka bertindak sebagai konsumen, sementara pada sisi penawaran, mereka berfungsi sebagai produsen (Prabawa et al., 2024).

Bagi daerah dengan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memungkinkan daerah tersebut untuk menambah produksi, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari jumlah penduduknya apabila tetap dilakukan penambahan tenaga kerja maka kenaikan tingkat produksi yang disebabkan oleh penambahan tenaga kerja yang tidak maksimal (Yunita et al., 2019).

Klasifikasi tenaga kerja dibagi menjadi dua kategori utama, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang telah bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Di sisi lain, bukan angkatan kerja merujuk pada penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak sedang mencari pekerjaan, termasuk individu yang berkegiatan sekolah namun menerima pendapatan yang bukan merupakan imbalan langsung dari jasa kerja (Badan Pusat Statistik 2020).

Kondisi ketersediaan lapangan kerja dapat diindikasikan melalui jumlah tenaga kerja yang terserap. Apabila kapasitas lapangan kerja meluas, maka total produksi di daerah tersebut cenderung mengalami kenaikan. Dengan demikian, akumulasi tenaga kerja yang besar berpotensi meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif. Oleh sebab itu,

peningkatan produktivitas tenaga kerja diharapkan mampu mendorong total produksi, yang secara langsung berkontribusi pada kenaikan nilai PDRB (Rozaini et al., 2023). Data jumlah angkatan kerja di Jawa Timur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Data Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur

TAHUN	BEKERJA	PENGANGGURAN	TPAK
2010	18.698.108	828.943	19.527.051
2011	18.940.340	821.546	19.761.886
2012	19.411.256	826.798	20.238.054
2013	19.553.910	878.543	20.432.453
2014	19.306.508	843.49	20.149.998
2015	19.367.777	906.904	20.274.681
2016	19.114.563	839.283	19.953.846
2017	20.099.220	838.496	20.937.716
2018	20.449.949	850.474	21.300.423
2019	21.032.612	835.13	21.867.742
2020	20.962.967	1.301.145	22. 264.112
2021	21.037.750	1.281.395	22.319.145
2022	21.613.293	1.255.719	22.869.012
2023	22.404.793	1.013.793	23.418.027
2024	23.236.078	902.348	24.138.426
2025	23.361.110	1.020.651	24.381.761

Sumber Data : Badan Pusat Statistika 2026

Tabel 1 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja terus mengalami peningkatan dari 18.698.108 di tahun 2020 menjadi 23.236.078 di tahun 2025, akan tetapi jumlah pengangguran di Jawa Timur mengalami

perubahan yang fluktuatif atau berubah-ubah, dalam rentan waktu empat belas tahun terakhir tingkat pengangguran tertinggi pengangguran pada tahun 2020 sebesar 1.301.145 juta jiwa hal tersebut dikarenakan adanya wabah *covid -19* di tahun tersebut yang mengakibatkan banyaknya PHK massal di berbagai sektor industri dimana banyak pekerja terpaksa keluar dari pasar kerja atau beralih ke sektor informal. Pada awal tahun 2021, dengan pelonggaran pembatasan dan program vaksinasi, tingkat partisipasi angkatan kerja mulai pulih dari tahun ke tahun hingga di tahun 2025 jumlah pengangguran menyusut angka 902.348 (BPS, 2026).

Sebagai wilayah dengan kosentras penduduk tertinggi yang mencapai 56,1% dari totsl populasi nasional, pulau jawa otomatis menjadi penyumbang pasar tenaga kerja terbesar di indonesia dengan tren yang terus melonjak tiap tahun. Menariknya, dinamika ekonom sempat menunjukkan keterpurukan pada periode 2019-2020, ketika jumlah ketersediaan ruang kerja dan pekerjaan melesat hingga 2,54%, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kawasan ini justru terkoreksi turun sebesar 4,14% (Riyadi & Woyanti, 2022).

Todaro dalam buku (Fatihudin, 2019) menjelaskan bahwa salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*), yang meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi melalui penyimpanan dan penginvestasian ulang sebagian pendapatan, yang difokuskan untuk memperluas output dimas yang akan datang. Investasi memegang peran sentral sebagai penggerak

pertumbuhan ekonomi, dengan kemampuan menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan melalui penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja inovatif bagi masyarakat, yang selanjutnya akan mendukung peningkatan pendapatan pada skala agregat.

Investasi dikategorikan menjadi investasi asing dan domestik. Di tingkat regional, investasi mencakup kontribusi dari pemerintah serta sektor swasta. Sementara investasi swasta bersumber dari entitas domestik maupun asing (Wahana, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tepatnya pada Pasal 1 Ayat 2, mengklasifikasikan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai mekanisme penanaman dana oleh investor domestik yang terdiri dari perseorangan WNI, korporasi atau badan usaha, serta aparat pemerintah sentral dan lokal dimana seluruh sumber pendanaan berasal dari aset keuangan dalam negeri. Sedangkan, Penanaman Modal Asing (PMA) merujuk pada bentuk investasi dari pihak luar negeri.

Sesuai Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 mengartikan PMA sebagai upaya penggelaran dana untuk mengembangkan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh pelaku investasi asing, yang dapat bersifat penuh dengan sumber modal eksternal atau berbentuk kerjasama dengan mitra domestik. Kenaikan volume investasi PMA dan PMDN secara proporsional dapat mendorong peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tabel 2 disajikan data investasi dalam negeri dan investasi asing di Provinsi Jawa timur pada periode 2010 – 2025 :

Tabel 3 Data Investasi Provinsi Jawa Timur

DATA INVESTASI JAWA TIMUR		
TAHUN	PMA (Juta US\$)	PMDN (Milyar Rupiah)
2010	1.769,20	8.084,10
2011	1.312,00	9.687,50
2012	2.298,80	21.520,30
2013	3.396,30	34.848,90
2014	1.802,50	38.132,00
2015	2.593,40	35.489,80
2016	1.941,00	46.331,60
2017	1.566,70	45.044,50
2018	1.333,40	33.333,10
2019	866,3	45.452,70
2020	1.575,50	55.660,60
2021	1.849,20	52.552,20
2022	3.134,00	65.355,90
2023	4.741,00	74.937,40
2024	3.664.08	92.410.10
2025	2.709.70	104.346.25

Sumber Data : Badan pusat statistika Jawa timur 2026

Tabel 2 diketahui bahwa dari data investasi berupa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang bersumber dari badan pusat statistik (BPS) pada rentan waktu 2010-2025. Investasi di provinsi jawa timur dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2025 cenderung fluktuatif. Investasi yang dilakukan oleh investor asing atau bisa disebut PMA berada di

angka terendah di tahun 2019 sebesar US\$ 866,3 atau sebesar -27.2% hal ini dikarenakan di tahun tersebut adanya ketidakpastian kebijakan seperti proses revisi UU cipta kerja yang menimbulkan kontroversi, termasuk kekhawatiran para investor asing terhadap perubahan aturan tenaga kerja dan lingkungan. Sehingga menyebabkan penundaan investasi, sedangkan untuk investasi Pma tertinggi pada tahun 2023 sebesar US\$ 4.741,00 atau sebesar 56% akan tetapi terjadi penurunan di tahun berikutnya pada tahun 2024, yaitu menjadi US\$ 3.664.08 atau sebesar 37,3% (Badan Pusat Statistik, 2026)

Sedangkan investasi yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), realisasi PMDN di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang periode 2010 hingga 2025. Lonjakan paling signifikan tercatat pada tahun 2025, dimana nilai investasi meroket sebesar Rp104.346,25 miliar sebuah lompatan impresif hingga 62,7% jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akselerasi yang masif ini menjadi indikator kuat bahwa iklim investasi di Jawa Timur kian kompetitif dan berhasil menumbuhkan kepercayaan yang tinggi bagi para investor domestik untuk menempatkan kapital mereka di wilayah ini.

Pertumbuhan ekonomi turut dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, sebab pengeluaran tersebut membentuk komponen kebijakan fiskal yaitu strategi intervensi pemerintah dalam mengelola dinamika perekonomian melalui penetapan besaran penerimaan dan pengeluaran tahunan, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tingkat nasional serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada level regional (Prabawa et al., 2024).

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program langsung untuk daerah terbelakang. Peran aktif pemerintah daerah terbukti memiliki peran aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah direpresentasikan melalui total belanja rutin serta belanja pembangunan yang tercantum dalam anggaran daerah. Ketika pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran yang bersifat produktif, hal tersebut cenderung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Harnita et al., 2020).

Alokasi belanja negara dan daerah memegang peran penting sebagai motor penggerak ekonomi, khususnya berupa intervensi atau stimulus pada fase awal roda perkembangan suatu wilayah. Landasan teoritis ini berpijak pada fakta bahwa setiap bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh otoritas publik mengemban tiga tanggung jawab utama, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilitas. Akan tetapi pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu rendah berpotensi merugikan dinamika pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran yang bersifat proporsional mampu mengakselerasi pertumbuhan tersebut, sementara pengeluaran yang bersifat boros cenderung menjadi penghambat suatu pertumbuhan ekonomi (Simarmata & Iskandar, 2022)

Tabel 4 Data Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2025

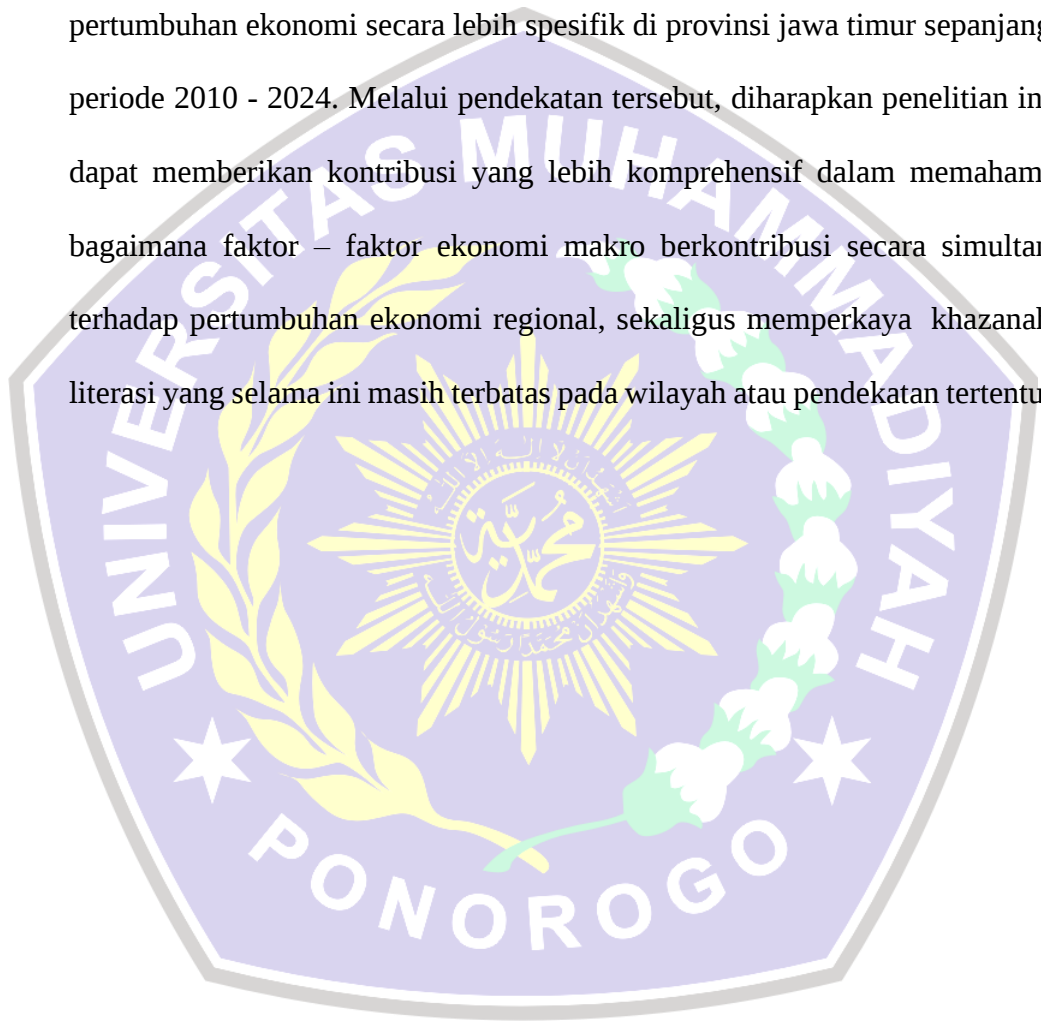
PENGELUARAN PEMERINTAH			
TAHUN	ANGGARAN(M)	REALISASI(M)	%
2010	59.765,15	59,376,45	99,35
2011	53.543,50	54.212,53	101.25
2012	61.668,14	64.417,40	104.46
2013	71.872,05	72.586,36	100.99
2014	83.205,78	85.502,01	102.76
2015	101.163,84	99.173,10	98.03
2016	111.755,65	107.385,11	96.09
2017	115.508,04	113.142,67	97.95
2018	121.364,47	116.724,14	96.18
2019	131.977,25	129.179,51	97.88
2020	141.094,98	122.610,10	86.90
2021	134.415,38	126.962,87	94.46
2022	132.921,12	132.262,51	99.50
2023	140.219,69	27.486,52	19.60
2024	151.888,71	42.582,41	28.04
2025	149.018,88	30.512,53	20.48

Sumber data : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026

Tabel 3 diketahui bahwa realisasi pengeluaran pemerintah Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 lebih besar dari pada anggaran yang disediakan oleh negara. Dari data diatas besarnya pengeluaran pemerintah dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan, dan realisasi pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp 132.262,51 peningkatan anggaran tersebut didorong oleh prioritas

pembangunan infrastruktur, penanganan pandemi *covid-19* dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah atau gap dari studi- studi terdahulu dengan mengintegrasikan analisis variabel jumlah tenaga kerja, investasi, dan pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara lebih spesifik di provinsi jawa timur sepanjang periode 2010 - 2024. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana faktor – faktor ekonomi makro berkontribusi secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus memperkaya khazanah literasi yang selama ini masih terbatas pada wilayah atau pendekatan tertentu.



1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2025?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa timur tahun 2010-2025?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2025?
4. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2025?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2025.
2. Mengetahui pengaruh tingkat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2025.
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2025.
4. Mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2025.

B. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait pengaruh jumlah tenaga kerja, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur, Dengan demikian hasilnya dapat menjadi rujukan utama bagi studi mendatang di bidang ekonomi pembangunan regional.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman serta pemahaman mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur.

3. Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya sebagai referensi mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi untuk penelitian yang lebih mendalam.